



SIARAN PERS

Pemerintah Kian Serious Garap KEK Arun Lhokseumawe

Jakarta, 12 Februari 2018

Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini ditandai dengan rencana pengembangan KEK Arun Lhokseumawe melalui perjanjian kerjasama kegiatan operasional barang milik negara (BMN) berupa aktiva kilang LNG Arun. Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan antara Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan PT Patriot Nusantara Aceh (PT PATNA) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Arun Lhokseumawe.

Aktiva kilang LNG Arun sendiri ditetapkan sebagai bagian dari KEK Arun Lhokseumawe berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017, sehingga secara keseluruhan, luas KEK Arun Lhokseumawe mencapai 2.622,48 hektare (ha) dengan rincian:

- 1.Kawasan Kilang Arun Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh seluas 1.840,8 ha;
- 2.Kawasan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh seluas 582,08 ha; dan
- 3.Kawasan Jamuan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh seluas 199,6 ha

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pengembangan KEK adalah upaya khusus untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang tidak Jawa sentris. Khusus untuk pengembangan KEK di Pulau Jawa hanya difokuskan di bidang jasa sementara sektor industri terpusat di luar Pulau Jawa.

“Kalau dibuka KEK Industri di Jawa, kawasan yang di luar Jawa tidak akan jalan atau laku,” ungkap Darmin saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional dan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe, Senin (12/2), di Kantor Kemenko Perekonomian.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari dan pejabat kementerian/lembaga terkait.

Darmin turut mengapresiasi atas perkembangan yang telah dicapai KEK Arun Lhokseumawe. Menurutnya, KEK Arun Lhokseumawe akan berkembang cepat, terlebih masalah lahan yang selama ini menjadi kendala pengembangan telah rampung. “KEK Arun Lhokseumawe beruntung karena lahannya dari awal sudah beres. Ini adalah lahan negara yang kemudian dimasukkan untuk dikembangkan menjadi KEK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Darmin mecermati bahwa negara tetangga pun telah mengembangkan kawasan ekonomi di sepanjang Selat Malaka seperti PSA Singapore, Iskandar (IRDA), Port Klang, Port Carey dan Port Pelepas. Oleh karena itu, dirinya meminta peran aktif Administrator KEK Arun Lhokseumawe dalam mengundang investor untuk datang.

“Kita harus lebih menarik dari mereka, seperti pelayanan perizinan investor. Dengan demikian tujuan percepatan pengembangan industri di luar Jawa bisa terlaksana,” kata Darmin.

Dalam acara yang sama juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Investasi antara PT Pelindo I dengan empat calon investor di KEK Arun Lhokseumawe, antara lain:

- a. Pelindo 1 dengan PT Aceh Makmur Bersama. Kerjasama mencakup pembangunan tangka timbun CPO dengan *progress* 40% dan beroperasi pada Mei 2018. Selanjutnya akan dikembangkan pengolahan turunan CPO di atas lahan seluas hingga 1,95 ha dan diharapkan mulai beroperasi awal 2019.
- b. Pelindo 1 dengan PT Sinergi Tangguh Alam Raya (PT STAR). Kerjasama dengan perusahaan penanaman modal asing ini bergerak di bidang usaha *plywood*, dengan target pembangunan Juni 2018.
- c. Pelindo 1 dengan PT East Continent Gas Indonesia, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan bidang usaha LPG Pressurised dan pabrik *bottling* LPG, yang ditargetkan mulai dibangun pada Juni 2018.
- d. Pelindo 1 dengan PT Prosperity Building Material. Penanaman Modal Asing (PMA) yang akan melakukan usaha di bidang logistik pengantongan semen, yang akan mulai dibangun Juni atau September 2018 dan mulai beroperasi awal 2019.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Hermin Esti Setyowati

email: humas.ekon@gmail.com

twitter: @perekonomianRI

website: www.ekon.go.id

Lembaga Manajemen Aset Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan RI

Jalan Cisadane No.6 , Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330

Telp. (021) 21392822; Fax: (021) 21392823

www.lman.kemenkeu.go.id